

**STRATEGI PENGEMBANGAN DANA WAKAF TUNAI  
(STUDI KASUS DI KSPPS BMT AMANAH UMMAH)  
MENURUT UU NO 41 TAHUN 2004**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh :

**YUNITA DWI SUSTIANTI**  
**I 000 160 141**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**STRATEGI PENGEMBANGAN DANA WAKAF TUNAI (STUDI KASUS  
DI KSPPS BMT AMANAH UMMAH) MENURUT UU NO 41 TAHUN 2004**


**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

  
**YUNITA DWI SUSTIANTI**  
**1000160141**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

  
**Dr. Imron Rosyadi, M.Ag**  
**NIDN. 0615036401**

## HALAMAN PENGESAHAN




### STRATEGI PENGEMBANGAN DANA WAKAF TUNAI (STUDI KASUS DI KSPPS BMT AMANAH UMMAH) MENURUT UU NO 41 TAHUN 2004

oleh:

**YUNITA DWI SUSTIANTI**  
**I000160141**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa, 07 Juli 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

#### Dewan Penguji:

1. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.  
(Ketua Dewan Penguji)  (.....)
2. Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc  
(Anggota I Dewan Penguji)  (.....)
3. Dr. Mu'inudinillah Basri, MA  
(Anggota II Dewan Penguji)  (.....)

Surakarta, 07 Juli 2020

Disahkan,  
Dekan,



**Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.**  
**NIDN. 0605096402**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Juni 2020

Penulis,



**YUNITA DWI SUSTIANTI**  
**I000160141**

## **STRATEGI PENGEMBANGAN DANA WAKAF TUNAI (STUDI KASUS DI KSPPS BMT AMANAH UMMAH) MENURUT UU NO 41 TAHUN 2004**

### **Abstrak**

Yunita Dwi Sustianti. I000160141. Strategi Pengembangan Dana Wakaf Tunai (Studi Kasus di KSPPS BMT Amanah Ummah) Menurut UU No.41 Tahun 2004. Skripsi. Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Konsepsi mengenai wakaf tunai, sampai saat ini ternyata banyak yang merespon dengan baik. Beberapa Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) banyak yang telah merealisasikannya. Maka dari itu strategi terhadap pengelolaan dan pengembangan dana wakaf tunai pada LKS-PWU perlu ditingkatkan demi perbaikan manajemen, pengelolaan dan pengembangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Karena banyak juga lembaga-lembaga penerima wakaf tunai yang tidak maksimal dalam mengembangkan dana wakaf tunai. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Amanah Ummah (KSPPS BMT Amanah Ummah) merupakan salah satu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang mengelola dan mengembangkan dana wakaf tunai. Selama berjalan satu tahun lebih, KSPPS BMT Amanah Ummah memiliki strategi pengembangan dana wakaf tunai yang sekilas baru dipraktikkan. Pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu apakah pelaksanaan strategi pengembangan dana wakaf tunai di KSPPS BMT Amanah Ummah sesuai dengan peraturan UU No. 41 Tahun 2004?. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan strategi pengembangan dana wakaf tunai di KSPPS BMT Amanah Ummah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk menarik suatu kesimpulan. Strategi pengembangan dana wakaf tunai di KSPPS BMT Amanah Ummah telah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004. Dilihat dari beberapa aspek yang ada dalam Bab V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pada UU No. 41 Tahun 2004, yaitu aspek kenaziran, beraskan prinsip syariah dan pengembangan secara produktif. Aspek kenaziran yaitu KSPPS BMT Amanah Ummah memiliki potret manajemen yang baik dan profesional dalam kenaziran dapat dilihat dari dua faktor yaitu transparansi dan tanggungjawab serta aspiratif. Beraskan prinsip syariah yaitu telah mengembangkan dana wakaf tunai beraskan prinsip syariah dari rukun dan syarat-syarat wakaf. Pengembangan secara produktif yaitu dana dari hasil wakaf tunai dimanfaatkan untuk mengalokasikan ke berbagai bidang, sehingga dari hasil pengembangan tersebut dapat dikembangkan kembali untuk kepentingan umat.

**Kata Kunci:** Strategi Pengembangan, Wakaf Tunai, UU No. 41 Tahun 2004, KSPPS BMT Amanah Ummah

## ABSTRACT

Yunita Dwi Sustianti. I000160141. Development Strategy for Cash Waqf Funds (Case Study in KSPPS BMT Amanah Ummah) According to Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Thesis. Sharia Economic Law Faculty of Islamic Studies, Muhammadiyah University of Surakarta.

The concept of cash waqf, so far it turns out that many have responded well. Several Sharia Financial Institutions that receive Wakaf Money (LKS-PWU) have realized it. Therefore the strategy for the management and development of cash waqf funds in the LKS-PWU needs to be improved in order to improve management, management and development in accordance with Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 concerning Waqf. Because there are many institutions that receive cash waqf that are not optimal in developing cash waqf funds. BMT Amanah Ummah Savings and Loans Cooperative (KSPPS BMT Amanah Ummah) is one of the Sharia Savings and Loans and Financing Cooperatives (KSPPS) that manages and develops cash waqf funds. For more than a year, BMT KSPPS Amanah Ummah has a strategy to develop a cash waqf fund which is only recently practiced. The main problem in this study is whether the implementation of strategies for developing cash waqf funds in KSPPS BMT Amanah Ummah are in accordance with Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 ?. So this study aims to determine the implementation of strategies for developing cash waqf funds in KSPPS BMT Amanah Ummah in accordance with Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. This type of research is classified as field research (*field research*), using descriptive qualitative analysis methods, namely by describing in detail the reality or circumstances of an object in sentence form in order to provide an outline description to draw a conclusion.

The strategy for developing cash waqf funds in KSPPS BMT Amanah Ummah is in accordance with Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Judging from several aspects contained in Chapter V Management and Development of Endowment Property in Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, namely aspects of alienation, based on sharia principles and productive development. The aspect of separation is the KSPPS BMT Amanah Ummah has a portrait of good and professional management in retirement can be seen from two factors namely transparency and responsibility and aspirations. Based on sharia principles, namely developing cash waqf funds based on sharia principles from the pillars and conditions of waqf. Productive development, namely funds from the results of cash waqf used to allocate to various fields, so that the results of the development can be developed again for the benefit of the people.

**Keywords:** Development Strategy, Cash Waqf, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, KSPPS BMT Amanah Ummah

## **1. PENDAHULUAN**

Sebagai inovasi dalam instrumen finansial Islam, wakaf tunai salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Karena wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan.

Sungguh potensi yang sangat luar biasa. Terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional dan oleh pengelola wakaf itu diinvestasikan di sektor yang produktif. Dijamin jumlahnya tidak akan berkurang, tapi bertambah bahkan bergulir. Oleh karena itu, dana-dana segar yang didapatkan dari hasil pemberdayaan wakaf tunai tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terkait dengan ibadah secara sempit seperti bangunan masjid, mushalla, makam, pondok pesantren dan lain-lain, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh. Pemahaman lama yang menempatkan pemanfaatan dari benda wakaf hanya untuk ibadah yang bersifat formil harus sudah ditinggalkan. Karena aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki variable yang sangat luas. Variable-variable tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian Negara untuk mengatur dan mengelolanya. Dengan wakaf yang dikelola secara baik, maka masyarakat akan sejahtera. Oleh karenanya, strategi pengelolaan wakaf yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Maka pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf untuk mengatur perwakafan di Indonesia.

Konsepsi mengenai wakaf tunai, sampai saat ini ternyata banyak yang merespon dengan baik. Beberapa Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) banyak yang telah merealisasikannya. Maka dari itu strategi terhadap pengelolaan dan pengembangan dana wakaf tunai pada LKS-PWU perlu ditingkatkan demi perbaikan manajemen, pengelolaan dan pengembangannya.

Karena banyak juga lembaga-lembaga penerima wakaf tunai yang tidak maksimal dalam mengembangkan dana wakaf tunai.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Amanah Ummah (KSPPS BMT Amanah Ummah) di Sukoharjo, Jawa Tengah adalah salah satu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang mengelola dan mengembangkan dana wakaf tunai. Selama berjalan satu tahun lebih, dari praktiknya ada beberapa hal yang sekilas baru dilaksanakan dalam pengelolaan dan pengembangan dana wakaf tunai di KSPPS BMT Amanah Ummah. Dari segi strategi penghimpunan dana wakaf tunai, KSPPS BMT Amanah Ummah menghimpun dana wakaf tunai dengan mengambil dari dana pembiayaan yang dilakukan oleh anggota KSPPS BMT Amanah Ummah sebesar 0,2%. Selain itu, adanya kebijakan pemotongan gaji sebesar 1,5% untuk wakaf tunai bagi seluruh karyawan KSPPS BMT Amanah Ummah.

Dari segi strategi pengembangan dana wakaf tunai, KSPPS BMT Amanah Ummah memiliki strategi pengembangan dana wakaf tunai salah satunya dengan membeli tanah dan membangun ruko-ruko atau gedung dari sebuah lahan atau tanah hasil sitaan anggota KSPPS BMT Amanah Ummah. Selanjutnya setelah gedung itu terbangun, KSPPS BMT Amanah Ummah akan menyewa gedung tersebut yang akan digunakan untuk pengembangan kantor cabang KSPPS BMT Amanah Ummah. Hasil dari penyewaan tersebut akan dialokasikan kembali untuk kepentingan umat.

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melihat lebih jauh dan melakukan penelitian skripsi mengenai bagaimana strategi pengembangan dana wakaf tunai di KSPPS BMT Amanah Ummah dan tatacara pengembangannya apakah sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pelaksananya, yaitu dengan judul strategi pengembangan dana wakaf tunai (studi kasus di KSPPS BMT Amanah Ummah) menurut UU No 41 Tahun 2004.

## **2. METODE**

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan menggambarkan keadaan secara jelas mengenai fenomena yang terjadi. Penelitian ini menghasilkan data



primer yaitu data dalam penelitian yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek riset melalui wawancara.

Metode yang digunakan dalam menganalisis yaitu metode deskriptif kualitatif dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat yang hasilnya akan dijelaskan secara deduktif yaitu menjelaskan secara umum menjadi khusus. Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya menggunakan deskriptif analisis, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknik analisis dokumen. Penulis akan menggambarkan tentang strategi pengembangan dana wakaf tunai yang ada di KSPPS BMT Amanah Ummah yang selanjutnya disesuaikan dengan UU No. 41 Tahun 2004.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Konsep Strategi Pengembangan Dana Wakaf Tunai di KSPPS BMT Amanah Ummah**

Eksistensi wakaf tunai di KSPPS BMT Amanah Ummah bermula ketika Kementerian Koperasi (KEMENKOP) menggulirkan program wakaf uang yang bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Salah satu tujuannya adalah untuk menambah modal usaha di BMT, maka pada tahun 2014 sekitar 130 an BMT di Indonesia menjadi *nazir* wakaf termasuk KSPPS BMT Amanah Ummah itu sendiri.

Oleh karena itu, KSPPS BMT Amanah Ummah merupakan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang sah dan terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan manajer *Baitul Maal* KSPPS BMT Amanah Ummah, Bapak Arif Luthfi Abdurrosyid. KSPPS BMT Amanah Ummah memiliki strategi khusus dalam pengembangan dana wakaf tunai, yaitu dengan membagi wakaf tersebut ke dalam dua bagian, wakaf uang dan wakaf tunai. Secara zat benda, wakaf uang dan wakaf tunai memiliki kesamaan yaitu zat uang itu sendiri. Namun secara penamaan dan praktiklah yang berbeda, tetapi keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Wakaf uang di KSPPS BMT Amanah Ummah dikelola oleh lembaga *Baitul Maal* yaitu lembaga keuangan dengan kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial), yang sumber dananya berasal dari Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF), atau sumber lain yang halal, kemudian disalurkan kepada *mustahiq* atau yang berhak.

Dalam praktiknya, pengembangan dana wakaf uang di KSPPS BMT Amanah Ummah tidak langsung diberikan kepada *mauquf 'alaih*, tetapi uang tersebut didepositokan terlebih dahulu melalui bentuk pengembangan investasi *mudarabah*, yaitu simpanan berjangka yang menggunakan sistem bagi hasil. Dengan bentuk pengembangan tersebut, uang wakaf yang diberikan oleh *wakif* dikelola dan dikembangkan serta diinvestasikan untuk pembiayaan produktif dan pembiayaan-pembiayaan lain yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Pokok uang dari pengembangan wakaf uang tidak boleh berkurang dan habis. Hasil dari pengelolaan di atas, baru bisa diberikan kepada *mauquf 'alaih* sesuai dengan perjanjian (akad) di awal yang biasanya digunakan untuk layanan kesehatan dan santunan anak yatim.

Berbeda dengan pengembangan dana wakaf melalui wakaf tunai. Wakaf tunai di KSPPS BMT Amanah Ummah dikelola oleh lembaga *Baitul Tamwil* yaitu lembaga yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Wakaf tunai di KSPPS BMT Amanah Ummah dimaknai dengan makna wakaf melalui uang dan dalam pengembangan dananya akan langsung diberikan serta digunakan untuk/oleh *mauquf 'alaih*. Apabila *wakif* mewakafkan uangnya untuk keperluan membangun masjid, maka KSPPS BMT Amanah Ummah selaku *naẓir* langsung mengembangkan dana tersebut kepada *mauquf 'alaih* guna membangun masjid. Karena pengembangan dana wakaf tunai langsung digunakan, maka banyak orang yang berminat untuk berwakaf melalui wakaf ini. Pada tahun lalu, hasil wakaf tunai dikembangkan untuk pembangunan masjid di Lombok dan

Gedung Dakwah Muhammadiyah di Yogyakarta yang diadakan oleh perkumpulan BMT se- daerah Jawa Tengah.

KSPPS BMT Amanah Ummah juga menerapkan strategi baru dalam mengembangkan dana wakaf tunai ini. Lembaga *Baitul Tamwil* KSPPS BMT Amanah sebagai pengelola wakaf tunai mengembangkan dana wakaf tunai dengan membeli tanah atau lahan dari hasil sitaan anggota KSPPS BMT Amanah Ummah. Di atas tanah tersebut dibangun ruko-ruko atau gedung perkantoran. Selanjutnya setelah pembangunan itu rampung, KSPPS BMT Amanah Ummah menyewakan ruko-ruko dan gedung tersebut kepada siapapun yang hendak menggunakannya.

Di samping itu juga, KSPPS BMT Amanah Ummah menyewa gedung perkantoran di atas dan digunakan untuk pengembangan kantor cabang KSPPS BMT Amanah Ummah. Hasil dari semua penyewaan tersebut dialokasikan dan dikembangkan kembali untuk kepentingan umat.

Dengan adanya konsep strategi-strategi pengembangan dana di atas, KSPPS BMT Amanah Ummah dapat mengelola dan mengembangkan dana wakaf tunai yang menurutnya baik dan tepat. Terlebih wakaf tunai baru berjalan selama satu tahun, masih banyak yang harus dievaluasi dan diperbaiki lagi untuk pengembangan strategi ke depannya. Dengan hal tersebut juga, secara teoritis dan praktis, KSPPS BMT Amanah Ummah telah menerapkan langkah-langkah atau tiga tahapan strategi pada umumnya, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi dalam mengembangkan dana wakaf tunainya.

### **3.2 Pengembangan Dana Wakaf Tunai di KSPPS BMT Amanah Ummah dengan UU No.41 Tahun 2004**

Secara umum peraturan tentang wakaf telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam UU tersebut, dijelaskan pada Bab V pasal 42 sampai 46 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Berdasarkan dengan data yang penulis dapatkan tentang pengembangan dana wakaf tunai di KSPPS BMT Amanah Ummah, menurut analisis yang penulis lakukan dalam pelaksanaan pengembangan dana wakaf tersebut telah sesuai dengan UU No.41 Tahun 2004. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek di bawah ini.

#### **3.2.1 Aspek Kenaziran**

Kehadiran *nazir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan dan pengembangan dana wakaf tunai sangatlah penting. Terlalu banyak contoh pengelolaan dan pengembangan dana wakaf tunai yang dikelola oleh *nazir* yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga dana wakaf tunai tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme *nazir* menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf jenis apapun termasuk wakaf tunai. Kualifikasi profesionalisme *nazir* secara umum dipersyaratkan menurut fikih sebagai berikut, yaitu: beragama Islam, *mukallaf* (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), *balig* (sudah dewasa) dan *'aqil* (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (professional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil.

Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya KSPPS BMT Amanah Ummah merupakan *nazir* wakaf yang sah dan terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal tersebut dapat membuktikan bahwasanya KSPPS BMT Amanah Ummah merupakan *nazir* terkualifikasi professional yang dipersyaratkan fikih atau hukum Islam. Mengingat salah satu tujuan pengembangan dana wakaf tunai ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *nazir* yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan professional. Dengan demikian, KSPPS BMT Amanah Ummah memiliki potret manajemen yang baik dan professional dalam lembaga kenaziran, dan dapat dilihat dari dua faktor sebagai berikut:

Pertama, transparansi dan tanggung jawab. Pada setiap akhir bulan dan tahunnya, KSPPS BMT Amanah Ummah selalu melaporkan dana wakaf tunai, baik penerimaannya dan pengembangan dana tersebut. Dilaporkan secara terbuka dan transparansi kepada para wakif, pejabat struktural yang ada di dalam lembaga itu sendiri dan lembaga yang terkait serta berwenang.

Kedua, Aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga kenaziran). Sebagai *nazir*, KSPPS BMT Amanah Ummah selalu mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan.

Dengan menentukan konsep strategi dan manajemen dalam mengembangkan dana wakaf tunai seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, merupakan bentuk wujud bahwa di dalam pengambilan keputusan KSPPS BMT Amanah Ummah tidak secara sepihak, namun mengedepankan musyawarah dan mendengarkan aspirasi dari siapapun, sehingga dapat membuka potensi-potensi yang berkembang. Kaidah prinsip dalam gerakan yang aspiratif merupakan cermin dari sifat adil dalam diri atau lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, dengan adanya dua faktor di atas, pengembangan dana wakaf tunai yang dikembangkan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh wakif, baik dari segi tujuannya, fungsinya maupun peruntukannya. Dalam hal ini apabila *wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka *naẓir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Praktik pengembangan dana tersebut telah terpaparkan pada penjelasan di atas poin (b), yang menggambarkan sangat jelas bahwa pengembangan dana tersebut sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Hal di atas sejalan dalam pasal 42 pada UU No. 41 Tahun 2004 yang berbunyi *naẓir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Lebih jelasnya lagi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu, *naẓir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam akta ikrar wakaf, dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, *naẓir* dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai prinsip syariah.

### 3.2.2 Berasaskan Prinsip Syariah

Dalam Pasal 43 ayat (1) pada UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *naẓir* dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sudah dilakukan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah dengan program pengembangan dana wakaf tunai yang dimilikinya. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam poin (b), dimana KSPPS BMT Amanah Ummah

mengembangkan dana wakaf tunai berasaskan prinsip syariah terlebih dari rukun dan syarat-syarat wakaf itu sendiri telah ditunaikan.

Apabila dilihat dari pihak penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), KSPPS BMT Amanah Ummah telah mengembangkan dana wakaf tunai dengan menyalurkan kepada penerima wakaf untuk kebajikan (kepentingan umum) dan hal tersebut sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang telah dijelaskan di latar belakang, salah satu program pengembangan dana wakaf tunai di KSPPS BMT Amanah Ummah adalah dengan membeli tanah dari hasil sitaan anggota dan akan dibangun ruko-ruko atau gedung perkantoran. Selanjutnya setelah pembangunan itu rampung, KSPPS BMT Amanah Ummah menyewakan ruko-ruko dan gedung itu, termasuk KSPPS BMT Amanah Ummah sendiri menyewa gedung perkantoran tersebut dan digunakan untuk pengembangan kantor cabang KSPPS BMT Amanah Ummah. Hasil dari semua penyewaan tersebut dialokasikan dan dikembangkan kembali untuk kepentingan umat.

Program pengembangan dana wakaf tunai tersebut menurut penulis telah sesuai dengan prinsip syairah, karena sejatinya hal itu pernah dilakukan oleh Utsman Bin Affan ketika mewakafkan sumurnya untuk kepentingan umat. Suatu ketika, pada masa Nabi Muhammad SAW, Kota Madinah pernah mengalami paceklik hingga kesulitan air bersih. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sebuah sumur milik seorang Yahudi, yaitu sumur Raumah. Rasa airnya mirip dengan sumur zam-zam. Kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dari Yahudi tersebut.

Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah kemudian bersabda, “*Wahai Sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surga-Nya Allah Ta'ala,*” demikian hadis riwayat (HR. Muslim).

Mendengar hal itu, Utsman bin Affan yang kemudian segera bergerak untuk membebaskan sumur itu tetapi Raumah tidak mau menjual sumurnya karena dapat merugikan dirinya sendiri. Singkat carita, pada awalnya Utsman dapat membeli setengah dari sumur itu, dan akhirnya Utsman membeli sumur Raumah secara keseluruhan seharga 20.000 dirham, maka sumur Raumah pun menjadi milik

Utsman seutuhnya. Kemudian Utsman bin Affan mewakafkan sumur Raumah untuk kepentingan umat. Sejak saat itu sumur Raumah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk orang Yahudi pemilik lamanya.

### 3.2.3 Pengembangan Secara Produktif

Dalam Pasal 43 ayat (2) pada UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif, dan penjelasan ayat ini adalah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

KSPPS BMT Amanah Ummah dalam melakukan strategi pengembangan dana wakaf tunai telah sesuai dengan UU di atas. Dimana semua program pengembangan dana wakaf tunainya dikembangkan secara produktif. Jika dilihat kembali pada BAB III, secara tidak langsung lembaga *Baitul Maal* yang mengelola perwakafan di KSPPS BMT Amanah Ummah mengembangkan dan memanfaatkan dana dari hasil wakaf termasuk wakaf tunai ke berbagai bidang. Bidang pendidikan, dengan bantuan beasiswa dan pembinaan yang diberikan kepada 50 anak yatim dan duafa. Bidang Kesehatan, menyediakan Rumah Amanah Sehat sebagai tempat pelayanan kesehatan, memberikan bantuan berupa layanan ambulan gratis. Dalam bidang pelayanan sosial, memberikan sedekah berupa nasi siap saji bagi jamaah salat jumat, kaum duafa dan orang jalanan, kemudian bantuan peringatan hari besar Islam, sosial kemanusiaan dan peduli bencana serta *recovery* pasca bencana alam bidang Pelayanan Sosial. Dan bidang pengembangan UKM, melakukan pemberdayaan bakso bakar dan sempolan ayam, dan pelatihan serta pemberdayaan *cleaning service*.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan kembali secara detail bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan

melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan syariah dan/atau instrumen keuangan syariah.

Dengan ketiga aspek yang telah dijelaskan di atas, selain dinilai telah sesuai dengan UU yang berlaku, tetapi ini juga merupakan faktor keberhasilan atas capaian yang diraih dan kematangan atas pengelolaan dan pengembangan dana wakaf tunai oleh KSSPS BMT Amanah Ummah.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi pengembangan dana wakaf tunai menurut UU No 41 tahun 2004 di KSPPS BMT Amanah Ummah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

Strategi pengembangan dana wakaf tunai di KSPPS BMT Amanah Ummah sudah sesuai dengan UU No.41 Tahun 2004. Dilihat dari beberapa aspek yaitu Aspek kenaziran, KSPPS BMT Amanah Ummah merupakan *nazir* wakaf yang sah dan terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal tersebut dapat membuktikan bahwasanya KSSPS BMT Amanah Ummah merupakan *nazir* terqualifikasi professional yang dipersyaratkan fikih atau hukum Islam. KSPPS BMT Amanah Ummah memiliki potret manajemen yang baik dan professional dalam lembaga kenaziran, dan dapat dilihat dari dua faktor yaitu transparansi dan tanggungjawab serta aspiratif. Berasarkan prinsip syariah yaitu KSPPS BMT Amanah Ummah telah mengembangkan dana wakaf tunai berdasarkan prinsip syariah dari rukun dan syarat-syarat wakaf, serta dengan menyalurkan hasil pengembangan dana wakaf tunai kepada penerima wakaf (*mauquf 'alaih*) untuk kebajikan (kepentingan umum). Pengembangan secara produktif yaitu KSPPS BMT Amanah Ummah dalam mengembangkan dana dari hasil wakaf tunai memanfaatkannya untuk mengalokasikan ke berbagai bidang, sehingga dari hasil pengembangan tersebut dapat dikembangkan kembali untuk kepentingan umat.

##### **4.2 Saran**

Selama penelitian, peneliti melihat adanya kekurangan yang harus diperbaiki dalam pengelolaan wakaf tunai di KSPPS BMT Amanah Ummah, yaitu: Sumber daya manusia di *Baitul Maal* yang mengola ZISWAF dari segi kuantitas perlu ditambah



agar mempermudah dalam mengelola dan mengembangkan wakaf tunai. Meningkatkan jumlah wakif dengan menggiatkan sosialisasi dan edukasi mengenai positifnya melakukan wakaf tunai sehingga masyarakat dapat tertarik untuk berwakaf. Menghadapi industri 4.0, perlu kiranya program wakaf tunai dimuat dengan dibuatnya aplikasi atau *web* yang khusus untuk pengelola wakaf. Hasil penelitian masih bersifat sederhana dan perlu penelitian lanjutan untuk melengkapi kekurangan dalam skripsi ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam. Jakarta: Sygma Exagrafika.

\_\_\_\_\_. 2008. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Islam.

*Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.